

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stakeholder

Teori stakeholder, peran dan kepentingan para pengguna laporan keuangan sebagai sumber informasi pengambilan keputusan menjadi subjek utama yang mendominasi penyajian laporan keuangan serta non-keuangan sebuah perusahaan. Konsep ini merujuk pada pandangan bahwa individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan sekaligus dipengaruhi oleh berbagai aktivitas yang terdokumentasikan dalam laporan perusahaan disebut sebagai stakeholder (Freeman, 2010).

Stakeholder dalam konteks ini mencakup beragam pihak seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas yang mungkin terkena dampak dari kebijakan serta operasional perusahaan. Menurut (Freeman, 2010) Hubungan saling ketergantungan antara perusahaan dan stakeholdernya menciptakan suatu dinamika yang mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan serta memahami berbagai perspektif dan kebutuhan yang ada diantara mereka,

Kepentingan para stakeholder menjadi sangat signifikan dalam konteks ini, terutama karena perusahaan diharapkan tidak hanya memprioritaskan kepentingan internal atau pribadinya sendiri. Sebaliknya, perusahaan juga diharapkan untuk mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan para stakeholder yang beragam (Husnatarina, 2024). Hal ini memperlihatkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan, dimana keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari segi finansial tetapi juga dari dampak positifnya terhadap masyarakat serta lingkungan.

Stakeholder sering kali diartikan sebagai pihak-pihak yang memerlukan dan memanfaatkan informasi yang terdapat dalam laporan aktivitas suatu entitas.

Keterkaitan stakeholder ini erat terkait dengan tingkat kepercayaan yang diberikan terhadap segala bentuk informasi yang disampaikan (Husnatarina, 2024).

Kerangka stakeholder theory secara umum dinyatakan bahwa , “*the purpose of an organization is to create as much value as possible for the stakeholder, whereby in the integration of relevant stakeholder interest into organizational value creation processes account for the challenges of the business society*”(Freeman, 2010).

Pengungkapan laporan emisi karbon menjadi krusial dalam merespon kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Stakeholder menginginkan laporan yang mencakup informasi terperinci mengenai pengungkapan emisi karbon. Oleh karena itu, stakeholder membutuhkan penyajian aspek lingkungan yang terkait dengan pengungkapan emisi karbon sebagai bagian integral dari laporan suatu perusahaan.

Keberadaan dan kelangsungan perusahaan bergantung terhadap stakeholder yang berkepentingan (Faisal et al., 2018). Perusahaan akan berusaha mencari cara untuk menyediakan manfaat bagi pihak yang berkepentingan yaitu stakeholder. Teori Stakeholder dapat diuji melalui analisis laporan keuangan perusahaan yang sekaligus menjadi cara perusahaan berkomunikasi secara efektif dengan *stakeholder* (Gray et al., 1995).

Komunikasi efektif yang dimaksud salah satunya berupa komunikasi pengungkapan emisi karbon serta menjadi bentuk tanggung perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. *Stakeholder* memiliki kendali untuk menekan perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon secara komprehensif dan lengkap (Zulaikha & Prafitri, 2016). Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengimplementasikan konsep sistem manajemen lingkungan supaya perusahaan terdorong untuk selalu mengungkapkan emisi (Rankin,2011).

2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjadi landasan penting bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, mengingat keberlanjutan dan keberhasilan perusahaan sering kali terkait erat dengan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan serta mempertahankan tingkat legitimasi di mata masyarakat. Teori ini menekankan pada dinamika hubungan antara perusahaan dan masyarakat, khususnya dalam konteks pemberian legitimasi yang diperoleh perusahaan melalui proses pengungkapan informasi. Pandangan ini diperkuat oleh (Gray,1996) yang menggambarkan bahwa pengungkapan tersebut berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan masyarakat, serta membangun legitimasi yang dapat menjadi dasar kepercayaan.

Legitimasi theory sering kali menjadi landasan utama dalam mengatasi permasalahan terkait pertanggungjawaban lingkungan, dimana keberlanjutan perusahaan tidak hanya diukur dari segi finansial, tetapi juga dari perspektif tanggung jawab sosial dan ekologis. Legitimasi diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan sejalan dengan nilai-nilai sosial yang lebih luas, dimana perusahaan dianggap sebagai bagian integral dari sistem sosial tersebut (Husnatarina, 2024). Konsep yang lebih sederhana, legitimasi sering diidentifikasi sebagai kepercayaan dan keterkaitan antara nilai-nilai sosial serta perusahaan. Oleh karena itu, setiap perbedaan antara nilai-nilai kedua sistem tersebut dapat mengancam legitimasi perusahaan secara langsung, serta menyoroti pentingnya perusahaan untuk selalu memastikan bahwa kegiatan mereka selaras dengan nilai-nilai masyarakat yang lebih luas untuk mempertahankan legitimasi yang diperlukan bagi kelangsungan dan pertumbuhan jangka panjang (Husnatarina, 2024).

Untuk memperoleh legitimasi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*), perusahaan melakukan berbagai upaya yang mendukung pertanggungjawaban lingkungan dan sosial sesuai dengan harapan para

stakeholder tersebut. Salah satu bentuk nyata dari pertanggungjawaban ini melalui pengungkapan emisi karbon (Husnatarina, 2024).

Pengungkapan emisi karbon memiliki dampak signifikan terhadap persepsi legitimasi yang dimiliki perusahaan di mata masyarakat. Oleh karena itu, praktik transparansi dan kelangsungan dalam pengungkapan informasi terutama terkait lingkungan, seperti pengungkapan emisi karbon menjadi krusial dalam membangun serta menjaga legitimasi yang positif di kalangan *stakeholder* (Husnatarina, 2024).

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung peduli terhadap isu-isu lingkungan karena mereka memahami bahwa menghadapi tekanan lingkungan akan lebih mudah jika sumber dana potensial untuk mengungkapkan emisi karbon tersedia (Tana & Bernadetta, 2021). Perusahaan berskala besar dapat mencerminkan sumber daya dan aktivitas operasional yang tinggi, sehingga memunculkan tekanan berupa tuntutan untuk mengungkapkan aktivitas lingkungan secara sukarela dan objektif untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Selviana & Ratmono, 2019). Untuk memperkuat legitimasi masyarakat, perusahaan harus dapat fokus pada penerapan sistem manajemen lingkungan untuk pengelolaan pengungkapan emisi.

2.3 Pengertian Emisi Karbon

Emisi karbon merupakan gas yang dilepaskan ke atmosfer akibat pembakaran senyawa karbon seperti CO₂, Solar dan bahan bakar lainnya yang turut menjadi penyumbang perubahan iklim bumi sehingga menjadi cenderung sulit diprediksi. Salah satu efek yang ditimbulkan dari emisi karbon adalah pemanasan global atau dikenal dengan istilah efek rumah kaca, emisi gas rumah kaca yang berlebihan akan terperangkap di bumi sehingga suhu menjadi meningkat (DLH, 2020).

Gas Rumah Kaca berasal dari aktivitas manusia seperti konsumsi bahan bakar, penguraian bahan organik, kegiatan industri dan penggunaan pupuk, peningkatan

efek yang ditimbulkan oleh gas rumah kaca semakin buruk sejak revolusi industri. Artinya, tidak dapat dipungkiri sektor industri khususnya manufaktur merupakan salah satu penyumbang emisi gas di atmosfer dan sektor lainnya seperti sektor pertanian, kehutanan serta sektor energi yang saat ini juga menjadi penyumbang emisi karbon terbanyak (DLH, 2020). Aktivitas primer manusia yang rutin dilaksanakan sehari-hari turut menghasilkan gas emisi, dimana emisi yang dihasilkan berasal dari kendaraan bermotor. Tidak hanya itu, aktivitas manusia tanpa disadari dapat menyumbang gas emisi bagi atmosfer diantaranya penggunaan perangkat elektronik, konsumsi bahan bakar berlebih hingga konsumsi makanan (DLH, 2020).

Semakin sering intensitas serta frekuensi aktivitas-aktivitas tersebut berlangsung maka akan semakin besar dampaknya bagi lingkungan. Bentuk penanganan terhadap dampak emisi karbon dan gas rumah kaca diantaranya melalui pembentukan kesepakatan internasional yaitu protokol Kyoto mengenai kewajiban pengurangan limbah emisi karbon.

2.4 Pengungkapan emisi karbon

Pengungkapan emisi karbon adalah tindakan pengungkapan dengan tujuan mengevaluasi emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan dan menetapkan target untuk mengurangi emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon merupakan bagian tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan akibat aktivitas operasional yang telah dilakukan perusahaan (Cahya, 2016). Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden No 98 tahun (2021) mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

Setiap perusahaan bertanggung jawab menyajikan dan melaporkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan perusahaan. Pertanggungjawaban terhadap lingkungan telah tertulis dalam pernyataan standar akuntansi keuangan

berisi regulasi terkait laporan keuangan disajikan terpisah oleh laporan berkaitan dengan lingkungan. Pernyataan rinci mengenai pengungkapan dapat ditemui pada pelaporan perusahaan.

Berbagai bentuk pengungkapan telah dirumuskan secara komprehensif oleh organisasi non-profit untuk membantu perusahaan dengan mudah mengumpulkan item yang perlu diungkapkan. Protokol pengungkapan yang tersedia saat ini seperti *Carbon Disclosure Project (CDP) Framework*, Standar Komprehensif Protokol Gas Rumah Kaca (GHG), standar modular GRI, dan lain-lain, Penelitian ini menggunakan item pengungkapan yang diuraikan oleh *Carbon Disclosure Project (CDP)* mengacu pada ringkasan kuisisioner dari penelitian Bo Bae Choi tahun 2013.

Pengungkapan emisi karbon diukur menggunakan *check list Carbon Disclosure Project (CDP)* yang telah dikembangkan oleh (Bae Choi et al., 2013) menunjukkan bahwa pengukuran emisi karbon dengan lima kategori utama, yaitu berikut : risiko dan peluang perubahan iklim (CC/ Climate Change), emisi gas rumah kaca (GHG/ Green House Gas), konsumsi energi (EC/ Energy Consumption), pengurangan gas rumah kaca dan biaya (RC/ Reduction and Cost) dan akuntabilitas emisi karbon (AEC/ Accountability of Emission Carbon) dan dari lima kategori utama tersebut, terdapat ada 18 item yang dapat diidentifikasi.

2.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengatur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu laba dari kegiatan bisnisnya. Selain itu profitabilitas dapat memberikan suatu informasi terkait ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar komponen pada laporan finansial khususnya pada laporan posisi keuangan komparatif dan laba rugi komparatif (Sari, 2020). Profitabilitas diinterpretasikan dengan seberapa banyak perusahaan dapat menghasilkan laba. Jika laba yang dihasilkan tinggi akan memperlihatkan

kecenderungan perusahaan mengindahkan pemaparan lingkungan (Bae Choi et al., 2013).

Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan entitas dalam menghasilkan laba. Profitabilitas yang relatif stabil memperhatikan kinerja baik dari manajemen suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Toni, 2021). Sedangkan menurut (Hery, 2017) profitabilitas merupakan representasi dari kapasitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Berdasarkan berbagai definisi profitabilitas yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah alat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui berbagai tindakan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam perusahaan.

Keberadaan suatu perusahaan dimana semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka perusahaan mempunyai kemampuan secara finansial dalam memasukkan strategi pengurangan emisi karbon ke dalam strategi bisnisnya (Trufvisa & Ardiyanto, 2019). Dalam teori legitimasi, peran profitabilitas menjadi signifikan karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih mampu memenuhi tuntutan yang diajukan oleh masyarakat (Husnatarina, 2024). Menurut Sari (2020) pengukuran Profitabilitas dapat menggunakan melalui 5 Rasio Profitabilitas sebagai berikut :

a. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets atau hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur tingkat kontribusi aset dalam menghasilkan laba bersih. Pada rasio *Return On Assets* ini dihitung dengan melakukan perbandingan laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi tingkat hasil pengembalian atas aset maka semakin besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan.

b. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity atau hasil pengembalian atas modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kontribusi modal dalam menciptakan laba bersih. *Return On Equity* dapat dihitung menggunakan laba bersih terhadap modal. Semakin tinggi tingkat pengembalian ekuitas, semakin besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, sebaliknya semakin rendah nilai rasio *Return On Equity* maka semakin rendah jumlah laba bersih yang dihasilkan dari modal.

c. *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin atau yang dikenal dengan Margin Laba Kotor merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur persentase laba kotor terhadap penjualan bersih. Rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi margin laba kotor, semakin besar laba kotor yang diperoleh dari penjualan bersih. Sebaliknya, jika margin laba kotor menurun, maka laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih juga akan menurun.

d. *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin atau disebut juga margin laba operasional merupakan rasio yang mengukur besarnya persentase laba operasional dibandingkan dengan penjualan bersih. Semakin tinggi margin laba operasional, semakin besar pula laba operasional yang diperoleh dari penjualan bersih, sebaliknya semakin rendah margin laba operasional, semakin kecil pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih.

e. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin atau Margin laba bersih merupakan rasio yang bertujuan untuk menilai persentase laba bersih atau penjualan bersih. Pada rasio ini digunakan untuk menghitung laba bersih terhadap penjualan bersih. Rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *Net Profit Margin*, semakin besar pula laba bersih yang

diperoleh dari penjualan bersih. Sebaliknya, jika *Net Profit Margin* menurun, hal ini mencerminkan penurunan laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih.

2.6 Sistem Manajemen Lingkungan.

Manajemen lingkungan merupakan manajemen yang tidak statis melainkan sesuatu yang dinamis, sehingga diperlukan adaptasi atau penyesuaian bila terjadi perubahan di perusahaan yang mencakup sumber daya, proses, dan kegiatan perusahaan (Bambang, 2020). Standar sistem manajemen lingkungan ISO 14001 mempunyai pengaruh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Besarnya manfaat yang dapat diperoleh perusahaan sesudah menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 adalah perlindungan lingkungan (Bambang, 2020). Rerangka konseptual untuk memudahkan perusahaan melakukan pengawasan, pengontrolan, dan pengembangan terkait dengan performa lingkungan biasa disebut sebagai sistem manajemen lingkungan (Walsh, 2022). Salah satu implementasi sistem manajemen lingkungan yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan rutin melakukan pembaharuan sertifikasi yang terkait dengan lingkungan. Sertifikasi yang biasa digunakan oleh perusahaan yaitu sertifikat ISO 14001. Sertifikat tersebut membahas berbagai aspek dan syarat ideal untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan pada perusahaan serta memastikan sesuai dengan standar pada sertifikasi (IEC, 2023).

ISO 14001 merupakan suatu standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang dikeluarkan oleh *internasional standards for organization* yang mengkhususkan pada persyaratan bagi formulasi dan pemeliharaan dari sistem manajemen lingkungan. Adanya standar ini dapat membantu perusahaan untuk melakukan pengawasan dan pengembangan performa lingkungan serta mengurangi dampak aktivitas perusahaan yang berlebihan terhadap lingkungan sekitar (P. Setiawan & Iswati, 2019).

2.7 Corporate Governance.

Corporate Governance atau yang dikenal sebagai tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip corporate governance (Effendi, 2016). *Corporate Governance* merupakan suatu peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah dan karyawan lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka (Darmawati et al., 2014). Menurut Nuryan, (2016) *Corporate Governance* merupakan sebuah proses dari struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama yaitu meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Prinsip – Prinsip *Corporate Governance* yang terdiri dari :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Perusahaan sebaiknya merumuskan secara jelas fungsi, hak, tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing organ perusahaan serta menyampaikan hal-hal tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan, aspek akuntabilitas harus dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan pihak lainnya. Prinsip akuntabilitas diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang muncul akibat pembagian tugas antar organ perusahaan, sekaligus untuk mengurangi risiko dari konflik kepentingan yang dapat terjadi antara manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan.

2. Transparansi

Transparansi mengharuskan tersedianya informasi yang terbuka, akurat, tepat waktu, jelas dan mudah diakses, terutama yang berkaitan dengan kondisi keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, serta struktur kepemilikan perusahaan. Informasi yang disampaikan tidak terbatas pada aspek material, tetapi harus disiapkan, diaudit dan disampaikan sesuai standar kualitas yang tinggi. Proses tersebut meliputi laporan keuangan, baik yang bersifat akuntansi maupun non akuntansi, serta audit tahunan yang dilakukan oleh auditor independen. Tujuannya adalah memberikan keyakinan yang objektif, sehingga distribusi informasi dapat dipercaya dan merata.

3. Responsibilitas

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

4. Kesenjangan

Kesenjangan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

5. Independensi

Perusahaan menyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

Mekanisme tata kelola yang berasal dari dalam dan dari luar perusahaan dan dari pemerintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang menangani tata kelola. Keseimbangan kekuatan berhubungan dengan tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam struktur tata kelola. Pihak-pihak dapat dikelompokkan menjadi pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan), profesi (akuntan, akuntan publik, konsultan hukum, appraisal, aktuaris, business valuer) dan internal perusahaan itu sendiri (pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pimpinan perusahaan) (Soemarso, 2018).

Tujuan dari mekanisme tata kelola yang baik adalah menghasilkan sistem pertanggungjawaban keuangan yang memadai dari perusahaan kepada *stakeholder*. Mekanisme ini terjalin antara pihak internal dan eksternal perusahaan, bagian penting dari hubungan antara kelompok ini adalah adanya institusi atau lembaga di bawah dewan komisaris dan direksi yang berinteraksi satu sama lain dalam menjalankan fungsinya. Dewan Komisaris mempunyai komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi, dan komite nominasi (Soemarso, 2018). *Corporate Governance* dalam penelitian ini diukur melalui Dewan Komisaris dan Komite Audit.

2.7.1 Dewan Komisaris

Menurut UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan terwakili secara adil (Indonesia, n.d.). Undang-Undang No 40/2007 juga mengatur mengenai tugas dan fungsi komisaris dalam beberapa pasal yaitu (Effendi, 2016):

- a. Pasal 1 butir (2) menyatakan kelembagaan dewan komisaris sebagai salah satu organ perseroan, selain Rapat Umum Pemegang Saham dan direksi. Butir 6 menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

- b. Pasal 114 ayat (2) menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Pasal 114 ayat (3) menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dewan komisaris diyakini dapat menjadi penghubung manajemen dengan berbagai pemegang saham perusahaan. Fungsi utama dewan komisaris adalah untuk mengformulasikan kebijakan dan strategi yang akan dijalankan oleh manajemen (Niza & Ratmono, 2019). Menurut (Nasih et al., 2019) Jumlah anggota dewan yang lebih sedikit diharapkan memiliki kinerja yang lebih baik karena mereka dapat berkolaborasi dan berkomunikasi secara lebih efektif, serta memiliki tingkat komitmen dan akuntabilitas yang lebih tinggi, sedangkan jumlah anggota dewan yang lebih besar lebih mungkin menyediakan sumber daya keuangan yang signifikan untuk mendukung lebih banyak inisiatif lingkungan hidup dan merasa terdorong oleh para pemangku kepentingan untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

2.7.2 Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2016). Tujuan dibentuknya komite audit adalah sebagai berikut (Effendi, 2016):

a) Pelaporan Keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.

b) Manajemen risiko dan kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

c) Tata kelola perusahaan

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan dan objektivitas dewan komisaris dan memiliki fungsi untuk memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris, menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang baik (Effendi, 2016).

Tanggung jawab komite audit di bidang tata kelola perusahaan adalah memberikan kepastian bahwa perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap konflik kepentingan dan manipulasi terhadap pegawainya (Effendi, 2016). Komite audit pada halnya tata kelola perusahaan memiliki peran dan tanggung jawab yaitu dengan memastikan bahwa manajemen senior membudayakan tata kelola perusahaan dan mengerti

semua pokok persoalan yang mungkin dapat memengaruhi kinerja finansial atau non-finansial.

Komite audit dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan komisaris, direksi maupun auditor internal dan eksternal. Salah satu fungsi komite audit adalah menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, serta auditor internal dan eksternal. Komite audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian. Komunikasi yang lancar antara komite audit dengan pihak yang berkepentingan akan menghasilkan peningkatan kinerja perusahaan terutama untuk aspek pengendalian (Effendi, 2016).

Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan GCG karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit (Effendi, 2016).

Menurut Niza & Ratmono (2019) melalui komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris, komite audit dapat membantu fungsi pengawasan dewan komisaris dengan melakukan penelaahan pada laporan perusahaan yang akan dipublikasikan. Komite audit memiliki tugas untuk menelaah informasi yang akan dipublikasikan perusahaan. Frekuensi rapat komite audit yang tinggi merepresentasikan tanggung jawab komite audit dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi frekuensi rapat komite audit maka semakin besar pula kemungkinan komite audit dapat mengetahui apabila terjadi masalah atau kesulitan dalam proses pengungkapan informasi perusahaan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan.

2.8 Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya, pada rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek dan jangka panjang apabila perusahaan juga dinyatakan dibubarkan (dilikuidasi) (Sari, 2020). Tujuan dan manfaat dari perhitungan Rasio Solvabilitas (Leverage) adalah sebagai berikut (Sari, 2020):

1. Mengetahui posisi total kewajiban perusahaan terhadap pihak kreditor.
2. Mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Menilai sejauh mana asset perusahaan mampu digunakan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban tetap.
4. Menilai proporsi aset perusahaan yang dibiayai melalui modal dan hutang.
5. Menentukan sejauh mana utang perusahaan memengaruhi pengelolaan asetnya.
6. Mengukur bagian setiap rupiah asset yang digunakan sebagai jaminan utang kepada kreditor, jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham, jaminan hutang, serta jaminan utang jangka panjang.
7. Menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan perbandingan tertentu.

Menurut (Sari, 2020) ada beberapa jenis-jenis Rasio Solvabilitas (Leverage) sebagai berikut:

a. *Debt to Assets Ratio (Debt Ratio)*

Debt Ratio atau rasio utang adalah rasio perbandingan antara total utang terhadap aset perusahaan. Rasio ini tujuan untuk membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat memahami besarnya porsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang, atau sejauh mana hutang memengaruhi pembiayaan aset. Apabila nilai debt ratio tinggi, maka perusahaan menghadapi lebih banyak kewajiban yang dapat mempersulit peluang perusahaan untuk memperoleh pendanaan baru. Hal ini juga berisiko membuat perusahaan kesulitan melunasi utang yang dimiliki.

b. Debt to Equity Ratio

Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan total utang terhadap modal. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui besarnya dana yang berasal dari kreditur dibandingkan dengan dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin kecil proporsi modal pemilik yang dapat dijadikan jaminan utang. Ketentuan umumnya adalah sebaiknya nilai *debt to equity ratio* kurang dari 0,5 dan bukan menjadi aturan tetap, namun kembali lagi bahwa ketentuan nilai amannya tergantung pada masing-masing industri.

c. Long Term Debt to Equity Ratio

Long Term Debt to Equity atau dikenal dengan rasio utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengevaluasi proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini bertujuan mengetahui sejauh mana dana jangka panjang dari kreditur digunakan dibandingkan dengan dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan.

d. Time Interest Earned Ratio

Time Interest Earned Ratio atau rasio kemampuan perusahaan dalam membayar bunga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunga utangnya. Rasio ini dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi bunga pinjaman serta membuka peluang memperoleh tambahan dana dari kreditur. Sebaliknya jika rasio ini rendah, perusahaan akan kesulitan membayar bunga dan biaya lainnya.

e. Operating Income to Liabilities Ratio

Operating Income to Liabilities Ratio adalah rasio yang membandingkan laba operasional terhadap kewajiban. Rasio ini digunakan untuk kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya dengan laba operasionalnya. Rasio laba operasional terhadap kewajiban ini sering dikenal sebagai *Coverage*

Ratio. Semakin tinggi nilai rasio laba operasional terhadap kewajiban maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam melunasi segala kewajibannya, namun apabila nilai rasio yang dihasilkan rendah maka semakin kecil pula tingkat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban.

Kerangka teori stakeholder menyatakan, leverage yang tinggi menunjukkan adanya tanggung jawab besar yang dimiliki oleh perusahaan terhadap para krediturnya. Kreditur memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa dana yang dipinjam oleh perusahaan dapat dikembalikan sesuai dengan batasan waktu tertentu. Sebagai hasilnya, perusahaan yang mengalami leverage yang tinggi lebih mungkin untuk mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas untuk melunasi kewajiban finansialnya daripada untuk membuat laporan sukarela. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan pengungkapan sukarela, sementara semakin perusahaan dengan leverage yang lebih rendah cenderung lebih besar kemungkinannya untuk melakukan pengungkapan sukarela.

Kreditur dapat memberikan tekanan kepada perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban finansial sehingga mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela yang dapat menambah biaya lebih besar. Hubungan antara leverage dan keputusan perusahaan menyoroti kompleksitas dalam mengelola alokasi sumber daya finansial, di mana pertimbangan mengenai pembayaran kewajiban serta pengungkapan sukarela menjadi dua aspek penting yang saling terkait dan memerlukan perhatian khusus dari pihak manajemen (Husnatarina, 2024).

2.9 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mendukung pengembangan hipotesa pada penelitian ini, dibawah ini merupakan tabel yang menjabarkan hasil penelitian yang relevan dengan variabel dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1. Ringkasan penelitian Terdahulu

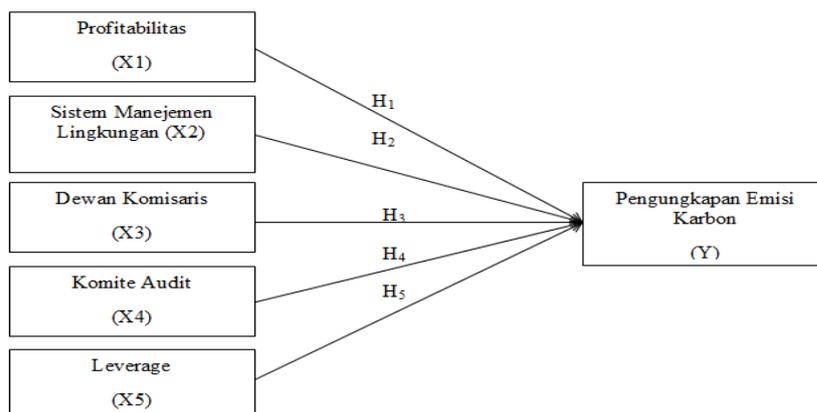
No	Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zanra et al., (2020)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Carbon Emission Disclosure dengan Kinerja Lingkungan sebagai Variabel Moderating	Variabel Dependen: Carbon Emission Disclosure Variabel Independen: Kepemilikan institusional, Ukuran dewan komisaris, Proporsi dewan komisaris independen, Keragaman gender, Ukuran perusahaan, Leverage dan Profitabilitas	Kepemilikan institusional, Ukuran dewan komisaris, Proporsi dewan komisaris independen, Keragaman gender, Ukuran perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
2.	Drajat Armono et al., (2024)	Pengaruh Direktur Asing, Tingkat Pendidikan Komisaris, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	Variabel Dependen: Pengungkapan Emisi Karbon Variabel Independen: Direktur Asing, Tingkat Pendidikan Komisaris, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Kinerja Lingkungan	(1) Direktur Asing dan Tingkat Pendidikan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. (2) Sistem Manajemen Lingkungan dan Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

3.	Angelina et al, (2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	Variabel Dependen: Pengungkapan Emisi Karbon Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kinerja Lingkungan	(1)Kepemilikan Institusional, Komite Audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon (2)Kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon
4.	Grediani et al., (2020)	Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca dengan Peran Audit Internal sebagai Pemoderasi	Variabel Dependen: Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca Variabel Independen: dewan komisaris independen, proporsi dewan komisaris perempuan, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit	(1) Proporsi dewan komisaris perempuan, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. (2) Dewan komisaris independen dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca.

5.	(Wiratno et al, 2020)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage terhadap Pengungkapan emisi karbon	Variabel Dependen: Pengungkapan Pengungkapan emisi karbon Variabel Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage	(1)Leverage memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon (2) Profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap (3)pengungkapan emisi karbon
----	-----------------------	---	---	---

2.10 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan menguji ada tidaknya hubungan antara variabel dependen yaitu pengungkapan emisi karbon dan variabel independen yaitu profitabilitas, sistem manajemen lingkungan iso 14001, dewan komisaris, komite audit dan kinerja lingkungan. Adapun hasil dari uraian tersebut maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

2.11 Bangunan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

Profitabilitas didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasional usahanya, dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Berdasarkan teori legitimasi perusahaan berskala besar dapat mencerminkan sumber daya dan aktivitas operasional yang tinggi, sehingga memunculkan tekanan berupa tuntutan untuk mengungkapkan aktivitas lingkungan secara sukarela. Keberadaan suatu perusahaan dimana semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka perusahaan mempunyai kemampuan secara finansial dalam memasukkan strategi pengurangan emisi karbon ke dalam strategi bisnisnya (Trufvisa & Ardiyanto, 2019). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi tidak perlu mengkhawatirkan biaya yang muncul akibat dari pengungkapan emisi karbon (Pangestu & Hati, 2024).

Sejalan dengan pendapat (Zanra et al., 2020) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian lain yang dilakukan oleh (I. Setiawan et al., 2022) tentang pengungkapan emisi karbon menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁ : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

2.11.2 Pengaruh Sistem Manajemen Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

Sistem Manajemen Lingkungan termasuk bentuk komitmen dalam kepedulian pada lingkungan, perusahaan menggunakan sebuah sistem manajemen sebagai standar agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola lingkungan. Perusahaan yang menjalankan sistem manajemen lingkungan cenderung lebih mudah untuk mengkomunikasikan program yang dijalankan dalam rangka pengurangan emisi karbon. Melalui sistem ini juga, emisi karbon yang

dipublikasi oleh perusahaan akan lebih meyakinkan daripada perusahaan yang tidak menjalankan sistem manajemen lingkungan (Rohmah & Nazmel Nazir, 2022). Dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan ini, perusahaan dapat memperoleh lebih banyak pengakuan dari masyarakat dan menciptakan struktur organisasi yang lebih terorganisir. Ini sesuai dengan teori legitimasi, di mana sertifikasi ISO 14001 menandakan bahwa perusahaan telah mengadopsi sistem manajemen lingkungan yang efektif, menegaskan kesesuaian kegiatan perusahaan dengan norma dan peraturan di wilayahnya (Drajat Armono et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ferdiani et al, 2023) yang menyimpulkan bahwa sistem manajemen lingkungan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan akan terus terdorong untuk selalu melakukan pembaruan dan integrasi sistem manajemen lingkungan melalui ISO 14001. Penelitian oleh (Drajat Armono et al., 2024) menghasilkan penelitian bahwa sistem manajemen lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂ : Sistem Manajemen Lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

2.11.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan bagaimana operasi perusahaan mempengaruhi pemangku kepentingan dan tidak boleh hanya berkonsentrasi pada memaksimalkan laba untuk kepentingan pemilik perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk memenuhi tuntutan dari stakeholders adalah melaporkan informasi terkait emisi karbon pada laporan tahunan dan keberlanjutan.

Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan manajemen dan perlindungan terhadap stakeholders, dewan komisaris akan mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Jumlah dewan komisaris yang tinggi

dapat memonitor manajemen menjadi lebih efektif. Semakin tinggi jumlah dewan komisaris, maka semakin banyak pihak yang dapat mendorong perusahaan melakukan tanggung jawab lingkungan terkait emisi karbon dan melakukan pengungkapan emisi karbon (Nasih et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Grediani et al., 2020) menyimpulkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, karena jika eksistensi dewan komisaris independen yang kuat bisa mendukung perusahaan lebih aktif dalam mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon. Dengan kata lain perusahaan yang mempunyai dewan komisaris independen cenderung lebih transparan dan bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka, hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃ : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

2.11.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

Komite audit merupakan kelompok yang terdiri dari individu-individu atau bagian dari dewan komisaris perusahaan yang bertugas secara khusus. Komite audit ini memiliki tanggung jawab utama dalam membantu auditor menjaga independensi mereka dari pengaruh manajemen. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan kinerja dan keunggulan komite audit (Angelina et al, 2023).

Teori stakeholder menegaskan bahwa ada hubungan antara kinerja sosial dan tingkah laku perusahaan sehingga teori ini memiliki peran penting pada kesinambungan perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit akan semakin terdorong untuk menerapkan prinsip corporate governance yaitu prinsip transparansi. Jumlah pertemuan yang dilakukan komite audit secara rutin juga berkontribusi pada pelaksanaan tanggung jawabnya untuk mendukung pengungkapan emisi karbon sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholder.

Semakin rutin komite audit mengadakan pertemuan, semakin banyak wawasan yang didapat sehingga komite audit dapat memperkirakan keputusan yang diambil dalam rangka mengutamakan kepentingan stakeholders yaitu dengan melaksanakan pengungkapan emisi karbon. Semakin berkualitas komite audit maka semakin mudah bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi sesuai yang diharapkan stakeholder.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Angelina et al,2023) dan (Solikhah et al., 2019) yang menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diujikan yaitu :

H₄ : Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

2.11.5 Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Teori stakeholder menyatakan, leverage yang tinggi menunjukkan adanya tanggung jawab besar yang dimiliki oleh perusahaan terhadap para krediturnya. Kreditur memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa dana yang dipinjam oleh perusahaan dapat dikembalikan sesuai dengan batasan waktu tertentu. Sebagai hasilnya, perusahaan yang mengalami leverage yang tinggi lebih mungkin untuk mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas untuk melunasi kewajiban finansialnya dari pada untuk membuat laporan sukarela. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan pengungkapan sukarela, sementara semakin perusahaan dengan leverage yang lebih rendah cenderung lebih besar kemungkinannya untuk melakukan pengungkapan sukarela. (Husnatarina, 2024).

Kreditur dapat memberikan tekanan kepada perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban finansial sehingga mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela yang dapat menambah biaya lebih besar. Hubungan antara leverage dan keputusan perusahaan menyoroiti kompleksitas dalam mengelola alokasi sumber daya finansial, di mana

pertimbangan mengenai pembayaran kewajiban serta pengungkapan sukarela menjadi dua aspek penting yang saling terkait dan memerlukan perhatian khusus dari pihak manajemen.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiratno et al, 2020) menyatakan bahwa Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diujikan yaitu :

H₅ : Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.